

Indikator	Institusi Penghasil	Definisi	Interpretasi
Pertumbuhan Ekonomi	Badan Pusat Statistik	Persentase perubahan nilai produksi barang dan jasa yang dihitung berdasarkan PDB atas dasar harga konstan.	Menunjukkan nilai output barang dan jasa yang dihasilkan dalam periode satu tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Indikator pertumbuhan ekonomi sangat berkaitan dengan indikator pembangunan lain seperti tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, rasio gini, indeks pembangunan manusia, penurunan emisi gas rumah kaca, serta nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya fokus pada level yang tinggi, melainkan juga diarahkan untuk inklusif sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat yang lebih luas dan menurunkan ketimpangan. Semakin tinggi nilai indikator pertumbuhan ekonomi, maka menunjukkan semakin baik perekonomian suatu negara.
Tingkat Kemiskinan	1. Badan Pusat Statistik 2. Kementerian PPN/Bappenas (Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat)	Persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Headcount Index secara sederhana mengukur proporsi yang dikategorikan miskin. Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).	1. Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk Indonesia 2. Tingkat kemiskinan yang tinggi mengindikasikan masalah serius dalam mencapai kesejahteraan dasar masyarakat.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Badan Pusat Statistik	Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.	Menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (supply) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak dimanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan bangungannya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi, perubahan siklus bisnis dan teknologi, dan lain-lain. Perbedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan ketersediaan di lapangan kerja antar kelompok tersebut.
Rasio Gini	Badan Pusat Statistik	Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat secara menyeluruh. Di Indonesia karena ketiadaan data pendapatan, Rasio Gini dihitung menggunakan data pengeluaran.	Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Badan Pusat Statistik	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia yang terdiri dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Nilai IPM berkisar antara 0 sampai dengan 100. Perhitungan yang digunakan adalah perhitungan IPM metode baru. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah.	Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Capaian IPM di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori: 1) Rendah: IPM < 60; 2) Sedang: 60 ≤ IPM < 70; 3) Tinggi: 70 ≤ IPM < 80; 4) Sangat tinggi: IPM ≥ 80.
Nilai Tukar Petani (NTP)	Badan Pusat Statistik	Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan perbandingan antara Indeks Harga yang Diterima Petani (It) dengan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib), untuk konsumsi rumah tangganya dan keperluan dalam memproduksi produk pertanian. Secara konsep NTP menyatakan tingkat kemampuan tukar atas barang-barang (produk) yang dihasilkan petani di pedesaan terhadap barang/jasa yang dibutuhkan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam proses produksi pertanian. Dari Indeks Harga yang Diterima Petani (It), dapat dilihat perkembangan harga komoditas/produk pertanian yang dijual oleh petani secara periodik. Dari Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib), dapat dilihat perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh petani di pedesaan maupun perkembangan harga barang dan jasa yang diperlukan untuk memproduksi komoditas/produk pertanian. NTP merupakan ukuran hubungan harga. NTP memberikan indikasi secara umum mengenai daya beli komoditas/produk pertanian terhadap barang dan jasa yang saat ini dibeli oleh petani baik untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari maupun untuk biaya produksi dan penambahan barang modal.	1. NTP > 100: petani mengalami kenaikan dalam hal perdagangan ketika rata-rata tingkat harga yang mereka terima mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayarkan terhadap tahun dasar atau ketika rata-rata tingkat harga yang mereka terima mengalami penurunan yang lebih lambat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayarkan terhadap tahun dasar. 2. NTP = 100: petani tidak mengalami perubahan dalam hal perdagangan karena perubahan harga yang diterima oleh petani sama dengan perubahan harga yang dibayar oleh petani terhadap tahun dasar. 3. NTP < 100: petani tidak mengalami perubahan dalam hal perdagangan karena perubahan harga yang diterima oleh petani sama dengan perubahan harga yang dibayar oleh petani terhadap tahun dasar.
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Badan Pusat Statistik	Nilai Tukar Nelayan (NTN) adalah rasio antara indeks harga yang diterima nelayan (It) dengan indeks harga yang dibayar nelayan (Ib). Masing-masing Indeks dihitung dengan menggunakan formula Modified Laspeyres Index. Secara konseptual, NTN pengukur kemampuan tukar produk perikanan tangkap yang dihasilkan nelayan dengan barang atau jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga nelayan dan keperluan mereka dalam menghasilkan produk perikanan tangkap. Indeks Harga yang diterima nelayan (It) dapat digunakan untuk melihat fluktuasi harga komoditas yang dihasilkan nelayan. Indeks ini juga digunakan sebagai data penunjang dalam penghitungan nilai produksi sektor perikanan tangkap. Indeks yang dibayar nelayan (Ib), dapat digunakan untuk melihat fluktuasi harga komoditas/jasa yang dikonsumsi oleh nelayan serta fluktuasi harga barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil perikanan tangkap.	1. NTN > 100 : Nelayan mengalami kenaikan dalam hal perdagangan ketika rata-rata tingkat harga yang mereka terima mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayarkan terhadap tahun dasar atau ketika rata-rata tingkat harga yang mereka terima mengalami penurunan yang lebih lambat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayarkan terhadap tahun dasar; 2. NTN = 100 : Nelayan tidak mengalami perubahan dalam hal perdagangan karena perubahan harga yang diterima oleh petani sama dengan perubahan harga yang dibayar oleh petani terhadap tahun dasar; 3. NTN < 100 : Nelayan subsektor perikanan mengalami penurunan dalam hal perdagangan ketika harga yang mereka bayar mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada harga yang mereka terima terhadap tahun dasar atau ketika harga yang mereka bayar mengalami penurunan yang lebih lambat daripada harga yang mereka terima terhadap tahun dasar.
Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer Nasional	Kementerian ESDM	Energi primer adalah energi yang diberikan oleh alam dan belum mengalami proses pengolahan lebih lanjut. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain berasal dari panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Bauran energi terbarukan (%) adalah persentase antara total pasokan energi terbarukan terhadap total pasokan energi primer.	Porsi Energi Baru Terbarukan dihitung sebagai ukuran tingkat keberhasilan kebijakan dalam menerapkan energi terbarukan dalam mewujudkan energi bersih dan sehat untuk lingkungan berkelanjutan.
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Badan Ketahanan Pangan	Pola Pangan Harapan merupakan keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan pada tingkat keluarga akan menentukan kualitas konsumsi pada tingkat wilayah, baik kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Artinya kualitas konsumsi pangan penduduk ditinjau wilayah (makro) ini dicerminkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH). Skor PPH ideal adalah 100. Semakin tinggi skor PPH, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi penduduk.	Skor PPH maksimal adalah 100 yang menunjukkan pola konsumsi ideal penduduk. Semakin tinggi skor PPH, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk.
Pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) secara berkelanjutan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia Pengelolaan WPPNRI berdasarkan 3 (tiga) pilar, yaitu kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan. Pengelolaan dan pemanfaatan WPPNRI dilakukan melalui perhitungan stok sumber daya ikan dan pemanfaatannya di WPPNRI. Tujuan indikator ini adalah untuk mengetahui tingkat pengelolaan dan pemanfaatan WPP secara berkelanjutan termasuk menjaga populasi ikan, menjaga ekosistem laut, dan mendukung keberlanjutan sektor perikanan. Indikator Pengelolaan dan Pemanfaatan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) secara Berkelanjutan sangat penting dalam upaya menjaga sumber daya perikanan global, menjaga keberlanjutan ekosistem laut, dan mendukung mata pencaharian nelayan serta sektor perikanan yang berkelanjutan.	Jumlah WPP yang dikelola dan menghasilkan pendataan estimasi sumber daya ikan yang lebih akurat.
Rasio kewirausahaan nasional	Badan Pusat Statistik (dialah oleh Dit. Pengembangan UMKM dan Koperasi Kementerian PPN/Bappenas)	Perhitungan rasio kewirausahaan berdasarkan perbandingan antara jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang berusaha sendiri dibantu buruh tetap dibagi dengan jumlah angkatan kerja.	Rasio kewirausahaan nasional yang tinggi dianggap sebagai tanda positif yang menunjukkan bahwa banyak angkatan kerja Indonesia yang menjadi wirausaha. Persentase yang rendah menunjukkan perlunya kebijakan yang dapat menarik minat para angkatan kerja untuk menjadi wirausaha dan membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain.

Pertumbuhan PDB pertanian	1. Badan Pusat Statistik 2. Kementerian Pertanian	Indikator Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian mengukur perubahan nilai PDB sektor pertanian suatu negara dari satu periode waktu ke periode waktu lainnya. Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Bruto (PDB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDB pertanian pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor pertanian dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh sektor pertanian. Pertumbuhan PDB sektor pertanian adalah indikator penting dalam menganalisis kinerja sektor pertanian suatu negara. Ini memberikan gambaran tentang sejauh mana sektor pertanian telah tumbuh atau menyusut dalam periode waktu tertentu, yang dapat memengaruhi ekonomi dan ketahanan pangan negara tersebut.	Pertumbuhan positif menunjukkan pertumbuhan sektor pertanian, sementara jika pertumbuhannya negatif, itu menunjukkan penurunan sektor pertanian dalam periode waktu tersebut.
Pertumbuhan PDB perikanan	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan 2. Badan Pusat Statistik	Indikator Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor perikanan mengukur perubahan nilai PDB sektor perikanan suatu negara dari satu periode waktu ke periode waktu lainnya. Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Bruto (PDB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDB perikanan pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor perikanan dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh sektor perikanan.	Jika hasilnya positif, itu menunjukkan pertumbuhan sektor perikanan, sementara jika hasilnya negatif, itu menunjukkan penurunan sektor perikanan dalam periode waktu tersebut.
Pertumbuhan PDB industri pengolahan	Badan Pusat Statistik	PDB industri pengolahan pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan. Perhitungan menggunakan atas dasar harga konstan. Pertumbuhan PDB industri dapat diperoleh dengan mengurangi nilai tambah industri manufaktur (pengolahan) pada tahun ke-t terhadap nilai tambah industri pada tahun t-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai tambah industri pada tahun t-1, dikalikan 100 persen.	Jika hasilnya positif, itu menunjukkan pertumbuhan sektor industri pengolahan, sementara jika hasilnya negatif, itu menunjukkan penurunan sektor industri pengolahan dalam periode waktu tersebut.
Kontribusi PDB industri pengolahan	Badan Pusat Statistik	Kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) yang bersumber dari sektor industri pengolahan.	Hasil dari rumus ini akan memberikan kontribusi PDB industri pengolahan sebagai persentase dari PDB total. Ini menunjukkan sejauh mana sektor industri pengolahan berkontribusi terhadap ekonomi negara tersebut dalam bentuk persentase.
Nilai devisa pariwisata	Bank Indonesia	Jumlah (nilai) devisa sektor pariwisata adalah penerimaan devisa dari sektor pariwisata yang berasal dari kunjungan wisatawan mancanegara. Penerimaan devisa dari sektor pariwisata mencakup, namun tidak terbatas pada penerimaan dari jasa perjalanan (travel) dan jasa transportasi penumpang (passenger transport).	Nilai devisa pariwisata yang merupakan kontribusi ekonomi dari sektor pariwisata negara tersebut.
Kontribusi PDB pariwisata	Badan Pusat Statistik	Kontribusi pariwisata terhadap PDB didefinisikan sebagai: (a) dari sisi produksi merupakan persentase rasio nilai tambah sektor-sektor terkait pariwisata terhadap total PDB (harga berlaku) dan (b) dari sisi pengeluaran merupakan persentase rasio penjumlahan pengeluaran ekonomi untuk pariwisata terhadap total PDB (harga berlaku). Laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB merupakan pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB dari periode t-1 ke periode t.	Hasil dari rumus ini akan memberikan kontribusi PDB pariwisata sebagai persentase dari PDB total. Ini menunjukkan sejauh mana sektor pariwisata berkontribusi terhadap ekonomi negara tersebut dalam bentuk persentase.
Penyediaan lapangan kerja per tahun	Badan Pusat Statistik	Penyediaan lapangan kerja per tahun merupakan jumlah tambahan lapangan kerja yang tercipta setiap tahun. Indikator ini sering digunakan untuk mengukur ekspansi ekonomi dan dapat menggambarkan kekuatan ekonomi nasional dalam menciptakan lapangan kerja baru.	Memberikan jumlah pekerja netto yang diperoleh oleh organisasi atau sektor selama periode waktu tersebut. Nilai positif menunjukkan pertumbuhan dalam penyediaan lapangan kerja, sementara nilai negatif menunjukkan pengurangan lapangan kerja.
Pertumbuhan investasi (PMTB)	Badan Pusat Statistik	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah.	Pertumbuhan investasi periode t dibanding periode t-1 adalah sebesar $y$ persen. Indikator pertumbuhan PMTB mengukur seberapa besar investasi berkontribusi terhadap perekonomian suatu daerah.
Pertumbuhan ekspor industri pengolahan	Badan Pusat Statistik	Pertumbuhan ekspor industri pengolahan dapat diperoleh dengan mengurangi nilai ekspor industri pengolahan pada tahun ke-t terhadap nilai ekspor industri pengolahan pada tahun t-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai ekspor industri pada tahun t-1, dikalikan 100 persen.	Angka positif menunjukkan terjadinya pertumbuhan pada ekspor industri pengolahan periode waktu tersebut dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sedangkan angka negatif menunjukkan terjadinya penurunan pada ekspor industri pengolahan periode waktu tersebut dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa	Badan Pusat Statistik	Ekspor barang dan jasa merupakan transaksi perdagangan barang dan jasa dari penduduk (resident) ke bukan penduduk (non-resident). Pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa didefinisikan sebagai kenaikan atau penurunan ekspor barang dan jasa Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada suatu periode. Penghitungan estimasi ekspor barang dan jasa ADHK diperoleh dengan metode deflasi, yaitu membagi ekspor Atas Dasar Harga Berlakau (ADHB) dengan indeks harga (deflator) yang bersesuaian. Deflator ekspor impor barang adalah Indeks Harga Perdagangan Internasional (IHPI) ekspor dan impor menurut HS 2 digit, sedangkan deflator ekspor impor jasa adalah Indeks Harga Konsumen (IHK) domestik dan internasional.	Angka positif menunjukkan terjadinya pertumbuhan pada ekspor riil barang dan jasa dalam periode waktu tersebut dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan angka negatif menunjukkan terjadinya penurunan pada ekspor riil barang dan jasa dalam periode waktu tersebut dibandingkan tahun sebelumnya.
Tingkat Inflasi Umum	Badan Pusat Statistik	Tingkat inflasi umum mengukur perubahan rata-rata harga konsumen secara keseluruhan dalam ekonomi suatu negara. Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Laju Inflasi digunakan untuk menghitung: 1. Indeksasi upah dan tunjangan gaji pegawai (wage indexation). 2. Penyesuaian Nilai Kontrak (project escalation). 3. Penentuan Target Inflasi (inflation targeting). Tingkat inflasi umum adalah salah satu metrik kunci dalam ekonomi yang membantu dalam memahami perubahan daya beli mata uang, stabilitas harga, dan dampaknya terhadap konsumen.	1. $INF_n < 0$ : tingkat harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga pada waktu (bulan atau tahun) (n) mengalami penurunan dibandingkan waktu (bulan atau tahun) (n-1). Keadaan ini disebut juga deflasi. 2. $INF_n = 0$ : tingkat harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga pada waktu (bulan atau tahun) (n) sama dengan waktu (bulan atau tahun) (n-1). 3. $INF_n > 0$ : tingkat harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga pada waktu (bulan atau tahun) (n) mengalami peningkatan dibandingkan waktu (bulan atau tahun) (n-1). Keadaan ini disebut juga inflasi.
Rasio perpajakan terhadap PDB / IKU	Kementerian Keuangan	Indikator Kinerja Utama (IKU) ini merupakan perbandingan penerimaan perpajakan terhadap produk domestik bruto nominal. Rasio ini merupakan alat ukur untuk menilai kinerja penerimaan perpajakan suatu negara. Komponen penerimaan perpajakan di Indonesia mencakup penerimaan pajak pemerintah pusat dan penerimaan kepebeanaan dan cukai.	Menunjukkan seberapa besar penerimaan pajak berkontribusi terhadap PDB. Semakin besar rasio ini, semakin besar kontribusi pajak terhadap perekonomian negara.
Laju Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja	Badan Pusat Statistik	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (r) adalah rata-rata laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per tenaga kerja dalam periode waktu tertentu. PDB yang dipergunakan adalah PDB atas dasar harga konstan, sedangkan data tenaga kerja yang diperlukan adalah jumlah orang yang bekerja (BPS). Indikator ini bertujuan untuk memantau tingkat produktivitas tenaga kerja dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi di suatu wilayah.	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja yang positif menunjukkan adanya peningkatan produktivitas tenaga kerja pada periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Semakin besar angka laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja, semakin tinggi produktivitas tenaga kerja yang dihasilkan di wilayah dalam periode tersebut.
Kapasitas terpasang pembangkit EBT	Kementerian ESDM	Indikator Kapasitas Terpasang Pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) adalah penting dalam menilai kontribusi energi terbarukan dalam pasokan energi total suatu wilayah atau negara. Hal ini mencerminkan seberapa besar potensi energi terbarukan yang dapat dihasilkan dan digunakan untuk mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil yang berdampak buruk pada lingkungan. Data kapasitas terpasang ini juga digunakan untuk merencanakan dan mengembangkan infrastruktur energi terbarukan.	Mencerminkan seberapa besar potensi energi terbarukan yang dapat dihasilkan dan digunakan untuk mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil yang berdampak buruk pada lingkungan.

Pemanfaatan biofuel untuk domestik	Kementerian ESDM	Indikator Pemanfaatan Biofuel untuk Domestik mengukur sejauh mana biofuel (bahan bakar yang diproduksi dari bahan organik, seperti bioetanol atau biodiesel) digunakan dalam konsumsi domestik suatu negara. Biofuel secara umum adalah bahan bakar dari biomassa (materi yang berasal dari tumbuhan dan hewan). Utamanya jenis biofuel yang umum digunakan yaitu biodiesel dan bioetanol. Pemanfaatan biofuel untuk domestik didefinisikan sebagai konsumsi domestik atas pemakaian jenis biofuel tersebut (B20, B30, B40). Pemanfaatan biofuel adalah indikator penting dalam mengukur keberlanjutan energi dan upaya negara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan ketergantungan pada bahan bakar fosil.	Data volume pemanfaatan biofuel menunjukkan seberapa besar penggunaan biofuel dalam konsumsi energi domestik. Peningkatan volume pemanfaatan biofuel akan sejalan dengan penurunan penggunaan bahan bakar fosil yang menunjukkan peningkatan penggunaan energi bersih di dalam negeri.
Produktivitas air (water productivity)	Kementerian PUPR	Indikator produktivitas air mengukur sejauh mana sumber daya air digunakan efisien dalam menghasilkan hasil pertanian atau hasil produksi lainnya. Indikator produktivitas air sangat relevan dalam konteks pertanian dan produksi pangan karena air adalah aspek penting dalam pertanian. Penggunaan air yang efisien dapat membantu meningkatkan produksi pangan dan meminimalkan dampak negatif terhadap sumber daya air dan lingkungan.	Hasil dari rumus ini akan memberikan tingkat produktivitas air, yang mencerminkan sejauh mana air digunakan dengan efisien untuk menghasilkan hasil produksi. Semakin tinggi nilai produktivitas air, semakin efisien penggunaan sumber daya air dalam proses produksi.
Nilai Tukar Petani (NTP)	Badan Pusat Statistik	Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan perbandingan antara Indeks Harga yang Diterima Petani (It) dengan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib), untuk konsumsi rumah tangganya dan keperluan dalam memproduksi produk pertanian. Secara konseptual NTP menyatakan tingkat kemampuan tukar atas barang-barang (produk) yang dihasilkan petani di pedesaan terhadap barang/jasa yang dibutuhkan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam proses produksi pertanian. Indeks Harga yang Diterima Petani (It), dapat dilihat perkembangan harga komoditas/produk pertanian yang dijual oleh petani secara periodik. Dari Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib), dapat dilihat perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh petani di pedesaan maupun perkembangan harga barang dan jasa yang diperlukan untuk memproduksi komoditas/produk pertanian. NTP merupakan ukuran hubungan harga. NTP memberikan indikasi secara umum mengenai daya beli komoditas/produk pertanian terhadap barang dan jasa yang saat ini dibeli oleh petani baik untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari maupun untuk biaya produksi dan penambahan barang modal.	1. NTP > 100: petani mengalami kenaikan dalam hal perdagangan ketika rata-rata tingkat harga yang mereka terima mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayarkan terhadap tahun dasar atau ketika rata-rata tingkat harga yang mereka terima mengalami penurunan yang lebih lambat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayarkan terhadap tahun dasar. 2. NTP = 100: petani tidak mengalami perubahan dalam hal perdagangan karena perubahan harga yang diterima oleh petani sama dengan perubahan harga yang dibayar oleh petani terhadap tahun dasar. 3. NTP < 100: petani tidak mengalami perubahan dalam hal perdagangan karena perubahan harga yang diterima oleh petani sama dengan perubahan harga yang dibayar oleh petani terhadap tahun dasar.
Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	1. Badan Pusat Statistik (BPS) 2. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)	Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa reproduksinya (15-49 tahun).	TFR sebesar 2,1 merupakan angka standar capaian ideal bagi seluruh negara yang disebut juga dengan istilah penduduk tumbuh seimbang. TFR yang berada di bawah angka 2,1 maka penduduk cenderung akan mengalami penurunan jumlah, namun jika TFR lebih dari 2,1 maka akan terjadi pertumbuhan penduduk.
Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Indikator ini digunakan untuk mengetahui angka potensi kehilangan PDB terkini yang disebabkan oleh bencana yang terjadi di Indonesia.	Semakin tinggi persentase penurunan potensi kehilangan PDB terkini yang disebabkan oleh bencana yang terjadi di Indonesia menunjukkan capaian yang semakin baik di bidang penanggulangan bencana.
Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Melayani	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK)	Dimensi Gerakan Indonesia Melayani merupakan salah satu dimensi yang menyusun Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM). Indeks ini berkaitan dengan pelayanan publik yang diberikan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada Rumah Tangga sesuai dengan fungsi satuan kerjanya. Satuan kerja yang memperoleh tugas untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat harus secara terus-menerus memperbaiki sistem pelayanan agar lebih cepat, lebih murah, lebih adil, lebih nyaman, memiliki kepastian hukum, dan berbasis IT. Pelayanan ini didorong untuk bertransformasi menjadi e-services, terlebih di era pandemi Covid-19 seperti saat ini. Aparatur Sipil Negara harus dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder, termasuk masyarakat. Sinergi dengan masyarakat antara lain dapat dijalin melalui penyediaan akses pengaduan mengenai pelayanan publik, dimana harus dapat ditangani secara cepat oleh unit kerja terkait. Indikator penyusunan dimensi Gerakan Indonesia Melayani adalah:  a) Persentase rumah tangga yang menyatakan bahwa pelayanan publik di wilayah tempat tinggalnya telah dilakukan secara cepat dan tidak berbelit-belit; b) Persentase rumah tangga yang menyatakan bahwa pelayanan publik di wilayah tempat tinggalnya telah dilakukan dengan biaya yang jelas; dan c) Persentase rumah tangga yang menyatakan bahwa pelayanan publik di wilayah tempat tinggalnya telah dilakukan secara tanggap melayani keluhan atau permintaan masyarakat	Dimensi ini menyatakan besarnya penilaian masyarakat terhadap kualitas penyelenggaraan layanan publik. Nilai capaian setiap indikator dinyatakan dalam persen dengan nilai minimum 0 dan nilai maksimum 100.
Kontribusi tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja	Badan Pusat Statistik	Kontribusi tenaga kerja di sektor industri pengolahan terhadap total tenaga kerja menunjukkan peran sektor industri pengolahan kepada keseluruhan lapangan kerja.	Perubahan dalam kontribusi tenaga kerja di sektor industri dapat mencerminkan pergeseran struktur ekonomi, pertumbuhan sektor industri, dan tingkat industrialisasi suatu negara. Analisis lebih mendalam mungkin diperlukan untuk memahami implikasi dari perubahan dalam kontribusi tenaga kerja terhadap perekonomian.
Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Jawa-Bali	Badan Pusat Statistik	Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Jawa-Bali menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa Wilayah Jawa-Bali dalam selang waktu satu tahun terakhir.	Pertumbuhan PDRB yang positif menunjukkan perkembangan ekonomi yang meningkat, sementara pertumbuhan negatif mengindikasikan perlambatan atau kontraksi ekonomi.
Pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa	Badan Pusat Statistik	Ekspor barang dan jasa merupakan transaksi perdagangan barang dan jasa dari penduduk (residen) ke bukan penduduk (non-residen). Pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa didefinisikan sebagai kenaikan atau penurunan ekspor barang dan jasa Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada suatu periode. Penghitungan estimasi ekspor barang dan jasa ADHK diperoleh dengan metode deflasi, yaitu membagi ekspor Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dengan indeks harga (deflator) yang bersesuaian. Deflator ekspor impor barang adalah Indeks Harga Perdagangan Internasional (IHPI) ekspor dan impor menurut HS 2 digit, sedangkan deflator ekspor impor jasa adalah Indeks Harga Konsumen (IHK) domestik dan internasional.	Angka positif menunjukkan terjadinya pertumbuhan pada ekspor riil barang dan jasa dalam periode waktu tersebut dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan angka negatif menunjukkan terjadinya penurunan pada ekspor riil barang dan jasa dalam periode waktu tersebut dibandingkan tahun sebelumnya.
Persentase penduduk miskin Wilayah Jawa-Bali	Badan Pusat Statistik	Persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Penduduk miskin Wilayah Jawa-Bali adalah penduduk Wilayah Jawa-Bali yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.	Semakin tinggi persentasenya, semakin besar proporsi penduduk yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan perawatan kesehatan.
Harapan lama sekolah (HLS)	Badan Pusat Statistik	Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang.	Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal pada waktu tertentu
IPM Provinsi di Wilayah Jawa-Bali	Badan Pusat Statistik	IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Wilayah Jawa-Bali adalah indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia di Wilayah Jawa-Bali dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.	Capaian IPM di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori: 1) Rendah: IPM < 60 2) Sedang: 60 ≤ IPM < 70 3) Tinggi: 70 ≤ IPM < 80 4) Sangat tinggi: IPM ≥ 80
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Kementerian Kesehatan	Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TBU) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TBU/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1995/MENKES/SK/XII/2010.	Prevalensi stunting yang tinggi di suatu wilayah menggambarkan beberapa masalah serius, termasuk: 1. Kekurangan Gizi: Stunting adalah indikator kekurangan gizi kronis. Prevalensi stunting yang tinggi menunjukkan bahwa banyak anak di wilayah tersebut menderita kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama. 2. Akses Pelayanan Kesehatan: Prevalensi stunting yang tinggi dapat mencerminkan akses yang terbatas ke pelayanan kesehatan berkualitas, termasuk pelayanan gizi dan kesehatan ibu dan anak. 3. Kemiskinan: Stunting sering kali terkait dengan kemiskinan. Keluarga yang miskin mungkin tidak mampu menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak mereka, yang pada gilirannya dapat menyebabkan stunting. 4. Pendidikan: Tingkat pendidikan orang tua, khususnya ibu, juga berpengaruh terhadap prevalensi stunting. Orang tua yang berpendidikan cenderung lebih memahami pentingnya gizi dan kesehatan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. 5. Faktor Lingkungan: Faktor lingkungan seperti sanitasi yang buruk dan akses terbatas ke air bersih juga dapat berkontribusi terhadap prevalensi stunting.

Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini	Badan Pusat Statistik	Persentase penduduk yang masih bersekolah di kelas 1 SD/MI/Sederajat yang sebelumnya pernah mengikuti pendidikan prasekolah terhadap seluruh penduduk yang masih bersekolah di kelas 1 SD/MI/Sederajat. Dalam hal ini, pendidikan prasekolah yang dimaksud meliputi Taman Kanak-kanak (TK), Bustanul Athfal (BA), dan Raudatul Athfal (RA).	Semakin tinggi Persentase Anak Kelas 1 SD/MI/Sederajat yang Pernah PAUD maka semakin banyak anak yang memiliki kesiapan dasar memasuki jenjang pendidikan dasar.
Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Badan Pusat Statistik	Bagian dari populasi instansi pemerintah dengan indeks RB lebih besar dari atau sama dengan B.	[K00614] Instansi Pemerintah [K01860] Reformasi Birokrasi (RB) [K02239] Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi [K01576] Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi (RB)
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	1) Badan Pusat Statistik 2) Kementerian ESDM	Indikator ini digunakan untuk mengetahui jumlah target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam sektor energi sesuai komitmen Presiden Indonesia tahun 2009 dalam Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) sesuai Perpres No. 61 tahun 2011.	Mengetahui perkembangan emisi gas rumah kaca dari sektor energi di Indonesia yang digunakan sebagai acuan/rekomendasi dalam penyusunan kebijakan pengembangan energi yang berwawasan lingkungan
Indeks Gini / Rasio Gini	Badan Pusat Statistik	Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat secara menyeluruh. Di Indonesia karena ketiadaan data pendapatan, Rasio Gini dihitung menggunakan data pengeluaran.	Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Badan Pusat Statistik	Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) menggambarkan proporsi penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang masuk ke pasar kerja, baik bekerja maupun mencari pekerjaan. Indikator ini menunjukkan besarnya tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam produksi barang dan jasa, relatif terhadap penduduk usia kerja di suatu negara/wilayah. TPAK yang semakin tinggi menunjukkan semakin besarnya peran dalam memberikan nilai tambah ke ekonomi.	Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Badan Pusat Statistik	IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung Gender Development Index (GDI) dan Human Development Indeks (HDI) pada tahun 2010. Perubahan metode ini merupakan penyesuaian dengan perubahan metodologi pada IPM. Selain sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya, IPG metode baru juga merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antargender dalam pencapaian pembangunan manusia	Nilai IPG yang semakin mendekati 100 menunjukkan capaian pembangunan manusia yang semakin setara antara laki-laki dan perempuan, dan sebaliknya.
Rata-rata lama sekolah (RLS)	Badan Pusat Statistik	Rata-rata jumlah waktu dalam satuan tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani, tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.	Semakin tinggi angka RLS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang sudah dicapai/ditempuh oleh penduduk berumur 15 tahun ke atas.
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Ditjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan, diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni: (1) dimensi ekonomi budaya, (2) dimensi pendidikan, (3) dimensi ketahanan sosial budaya, (4) dimensi warisan budaya, (5) dimensi ekspresi budaya, (6) dimensi budaya literasi, dan (7) dimensi kesetaraan gender.	Angka IPK menggambarkan upaya pemerintah dalam mengukur upaya kemajuan pembangunan kebudayaan. Semakin tinggi IPK menunjukkan bahwa semakin baik kinerja pembangunan kebudayaan. Nilai IPK diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu diatas capaian nasional dan dibawah capaian nasional.
Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Kementerian Pemuda dan Olahraga bekerjasama dengan Kementerian PPN/Bappenas dan validasi oleh Badan Pusat Statistik	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) hadir sebagai ukuran yang dapat menggambarkan capaian pembangunan pemuda di Indonesia. IPP terdiri dari 5 domain pembangunan yang di dalamnya memuat 15 indikator pembangunan pemuda. Kelima domain tersebut adalah (1) domain pendidikan, (2) domain kesehatan dan kesejahteraan, (3) domain lapangan dan kesempatan kerja, (4) domain partisipasi dan kepemimpinan, serta (5) domain gender dan diskriminasi.	Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan capaian yang semakin baik
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan indeks pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. iBangga digunakan untuk mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga langgguh (>70), berkembang (40-70) atau rentan (<40).	Nilai iBangga menunjukkan tingkatan kualitas pembangunan keluarga di Indonesia. iBangga dengan nilai lebih dari 70 maka akan masuk dalam kategori langgguh, antara 40-70 akan masuk dalam kategori berkembang dan apabila kurang dari 40 akan masuk dalam kategori rentan.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).	Semakin tinggi nilai IKLH nasional/daerah, menunjukkan kualitas lingkungan hidup semakin baik. Capaian IKLH di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi lima kategori: 1) Sangat Kurang: 0 ≤ IKLH < 25; 2) Kurang: 25 ≤ IKLH < 50; 3) Sedang: 50 ≤ IKLH < 70; 4) Baik: 70 ≤ IKLH < 90; 5) Sangat Baik: 90 ≤ IKLH ≤ 100
Ormas Terdaftar	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pendaftaran adalah proses pencatatan terhadap Ormas yang tidak berbadan hukum untuk pencatatan dalam administrasi pemerintahan dengan persyaratan tertentu untuk diberikan SKT oleh Pemerintah yang diselenggarakan oleh Menteri.	Semakin besar nilai indikator, semakin banyak jumlah ORMAS yang bisa membantu kegiatan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan peningkatan kesejahteraan masyarakat wilayah.
Ormas	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan.
Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Badan Pusat Statistik	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) adalah indikator komposit yang datanya diperoleh dari Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK). Variabel penyusun IPAK dipilih dari sekumpulan pertanyaan pada kuesioner SPAK menggunakan Explanatory Factor Analysis (EFA). Rentang indeks 0-5. Nilai indeks semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi.	Semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin antikorupsi, sedangkan nilai indeks yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi.
Indeks Pelayanan Publik Provinsi	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Berdasarkan PermenPAN RB No.29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP). Secara umum, terdapat 6 (enam) aspek pengukuran yang digunakan antara lain 1) Kebijakan Pelayanan, 2) Profesionalisme SDM, 3) Sarana Prasarana, 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik, 5) Konsultasi dan Pengaduan serta 6) Inovasi.	- 4,51 - 5,00: Kategori A/ Pelayanan Prima Unit pelayanan yang sudah menerapkan seluruh aspek dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai peraturan perundangan-undangan. - 4,01 - 4,50: Kategori A-/Sangat Baik Unit pelayanan sudah menerapkan seluruh aspek dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai peraturan perundangan-undangan tetapi masih ada kekurangan di beberapa indikator. - 3,51 - 4,00: Kategori B/ Baik Unit pelayanan sudah menerapkan kebijakan pelayanan namun belum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, memiliki sarana prasarana yang baik, sudah memiliki inovasi tetapi belum diterapkan secara optimal. - 3,01 - 3,50: Kategori B-/ Baik (Dengan Catatan) Unit pelayanan sudah menerapkan sebagian kebijakan pelayanan namun belum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, memiliki sarana prasarana yang baik dengan beberapa catatan, sudah memiliki inovasi tetapi belum diterapkan secara optimal. - 2,51 - 3,00: Kategori C/ Cukup Unit pelayanan belum mengimplementasikan kebijakan pelayanan publik secara optimal, kapasitas SDM masih perlu pengembangan, sarana prasarana belum memadai, inovasi belum diterapkan sebagai kebutuhan. - 2,01 - 2,50: Kategori C-/Cukup (Dengan Catatan) Unit pelayanan hanya sebagian mengimplementasikan kebijakan pelayanan publik, kapasitas SDM kurang memadai, ketersediaan sarana prasarana tidak lengkap dan kurang memadai, sistem informasi sebagian besar masih manual dan belum terdapat inovasi. - 1,51 - 2,00: Kategori D/ Buruk Unit pelayanan yang mendapat nilai tersebut menjadi prioritas pembinaan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publiknya. - 1,01 - 1,50: Kategori E/ Sangat Buruk Unit pelayanan yang mendapat nilai tersebut menjadi prioritas pembinaan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publiknya. 355 - 0 - 1,00: Kategori F/Gagal Unit pelayanan yang mendapat nilai tersebut menjadi prioritas pembinaan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publiknya.

Kawasan di permukiman kumuh perkotaan yang ditangani melalui permukiman kota	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Indikator ini menjelaskan jumlah kawasan di permukiman kumuh perkotaan yang ditangani pemerintah melalui permukiman kota. Penanganan kawasan kumuh merupakan salah satu prioritas nasional yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Perumahan permukiman dilakukan untuk mewujudkan kondisi lingkungan hunian yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan MBR melalui penataan dan perbaikan kualitas permukiman di kawasan kumuh. Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kondisi rumah, permukiman, dan lingkungan hunian di kawasan kumuh supaya lebih baik, mewujudkan subsidi silang antara pemerintah dan swasta dalam permukiman kawasan kumuh, dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang ditinggal di kawasan kumuh.	Semakin besar nilai ini maka semakin banyak kawasan permukiman kumuh yang tertangani melalui permukiman kota.
Perkembangan jumlah pembangkit listrik	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten	Pembangkit listrik adalah sekumpulan peralatan dan mesin yang digunakan untuk membangkitkan energi listrik melalui proses transformasi energi dari berbagai sumber energi. Sebagian besar jenis pembangkit listrik menghasilkan tegangan listrik arus bolak-balik 3-fasa. Selain itu, sebagian besar pembangkitan listrik menggunakan generator sinkron yang didukung oleh penggerak mula yang memperoleh energi dari bahan bakar atau sumber daya alam. (Wikipedia) Pembangkit listrik (power plant) merupakan tempat atau sumber energi listrik dibangkitkan yang didalamnya terdapat generator sebagai pembangkit listriknya dan turbin sebagai penggeraknya (prime mover). (F. J. Tasiam, 2017).	Perkembangan positif jika jumlah pembangkit listrik pada tahun ke N lebih besar dibanding tahun ke N-1, tidak ada perkembangan jika jumlah pembangkit listrik pada tahun ke N = jumlah pembangkit listrik pada tahun ke N-1, perkembangan negatif jika jumlah pembangkit listrik padatahun ke N " lebih kecil " dibandingkan jumlah pembangkit listrik pada tahun ke N-1
Perkembangan kapasitas listrik	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten	Kondisi Kapasitas Listrik Tahun Yang sedang berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya di provinsi banten.	Perkembangan positif jika jumlah Kpasitas listrik pada tahun ke N lebih besar dibanding tahun ke N-1, tidak ada perkembangan jika jumlah KApasitas listrik pada tahun ke N = jumlah KApasitaslistrik pada tahun ke N-1, perkembangan negatif jika jumlah KApasitaslistrik padatahun ke N " lebih kecil " dibandingkan jumlah Kpasitas listrik pada tahun ke N-1.
Rasio elektrifikasi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten	Perbandingan Jumlah Pelanggan Listrik (PLN dan Non PLN ) dengan jumlah rumah tangga	Jumlah Rumah Tangga Pelanggan Listrik (PLN dan Non PLN) / Jumlah Rumah Tangga X 100, jika = 100 artinya kebutuhan listrik rumahtangga sudah terpenuhi. Jika Lebih Kecil dr 100% Maka Kebutuhan Listrik Rumah Tangga belum terpenuhi
Prosentase perkembangan sambungan listrik desa/ kelurahan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten	Perkembangan Prosentase Desa/Kelurahan yang sudah mendapatkan Sambungan Listrik. Jika 1 Rumah Tangga saja dalam 1 Desa/ kelurahan suah mendapatkan aliran listrik (PN dan Non PLN) maka dianggap desa/kelurahan sudah mendapatkan sambungan listrik di provinsi banten	Jika Indikator =100 % maka seluruh desa/ kelurahan sudah tersambung dengan aliran listrik; Jika IndikatorLEbih Kecil dari100% maka masih terdapat desa/kelurahan yang belum di aliri listrik
Meningkatnya prosentase masyarakat yang telah terakses oleh Infrastruktur listrik di Provinsi Banten pada tahun N	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten	Tingkat prosentase masyarakat di Banten yang telah terakses infrastruktur listrik.	Perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan baik dari perusahaan listrik negara PLN maupun listrik non PLN dibagi dengan jumlah rumah tangga.
Penyerahan Modal (Investasi) BUMD Pemerintah Provinsi Banten	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten	Setiap usaha dalam Penyerahan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan	Semakin besar nilai indikator, semakin tinggi nilai investasi pemerintah daerah
Nilai Realisasi Pendapatan Daerah (APBD)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten	Semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan	Semakin besar nilai indikator, semakin tinggi pertumbuhan keuangan daerah
Nilai Realisasi Belanja Daerah (APBD)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten	Semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan	Semakin besar nilai indikator, semakin tinggi pertumbuhan keuangan daerah
Nilai Realisasi Pembelian Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten	Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya	Semakin besar nilai indikator, semakin baik untuk menutupi defisit anggaran atau dapat dimanfaatkan untuk program pembangunan daerah
Nilai SILPA APBD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten	Selisih lebih antara realisasi pendapatan -LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan	Semakin kecil nilai indikator, semakin baik perencanaan penganggaran APBD
Jumlah Aset	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten	Sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya	Semakin besar nilai indikator, semakin bertambah kekayaan pemerintahan daerah
Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten	Menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan oleh daerah	Semakin besar nilai indikator, semakin tinggi rasio kemandirian daerah
Rasio PAD terhadap Dana Transfer (Kemandirian Daerah )	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten	Menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan oleh daerah	Semakin besar nilai indikator, semakin tinggi rasio kemandirian daerah
Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan di Provinsi Banten	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten	Bagian laba dari BUMD dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga	Semakin besar nilai indikator, semakin tinggi nilai Pendapatan Asli Daerah
Opini BPK	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten	opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajiban informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan	Semakin besar nilai indikator, semakin baik Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten	Rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengkajihsaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah	Semakin besar nilai indikator, semakin efektif dan efisien tata kelola pemerintahan
Capaian Database Aset Provinsi Banten	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten	Capaian Kesesuaian Database aset terhadap Manajemen Aset Daerah	Semakin besar nilai indikator, semakin meningkat Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib, efektif dan efisien
Persentase Pengelolaan Aset Provinsi Banten	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten	Capaian Kesesuaian Pengelolaan Aset terhadap Manajemen Aset Daerah	Semakin besar nilai indikator, semakin meningkat Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib, efektif dan efisien
Capaian Sertifikasi Aset Provinsi Banten	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten	Capaian Kesesuaian Sertifikasi Aset terhadap Manajemen Aset Daerah	Semakin besar nilai indikator, semakin meningkat Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib, efektif dan efisien
Capaian Penertiban Aset Provinsi Banten	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten	Capaian Kesesuaian Penertiban Aset terhadap Manajemen Aset Daerah	Semakin besar nilai indikator, semakin meningkat Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib, efektif dan efisien
Persentase pengelolaan anggaran daerah yang tepat waktu transparan dan akuntabel	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten	Cakupan kesesuaian Pengelolaan anggaran daerah terhadap dokumen penganggaran	Semakin besar nilai indikator, semakin meningkat Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Transparan
Persentase Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten	Cakupan kesesuaian dokumen evaluasi Kabupaten/Kota terhadap peraturan perundangan undangan	Semakin besar nilai indikator, semakin meningkat Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Transparan
Persentase Kesesuaian laporan dengan Standar Akutansi Pemerintah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten	Cakupan Kesesuaian Laporan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAP)	Semakin besar nilai indikator, semakin meningkat Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Transparan
Persentase pengelolaan belanja daerah yang efektif dan efisien	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten	Cakupan kesesuaian Pengelolaan belanja daerah terhadap dokumen pencairan dana	Semakin besar nilai indikator, semakin meningkat Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Transparan
Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten	Cakupan Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dibagi Jumlah Kegiatan yang diampu	Semakin besar nilai indikator, semakin meningkat Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten	Bagian dari Program Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian negara/lembaga atau unit kerja pada SKPD	Semakin besar nilai indikator, semakin meningkat ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten	Bagian dari Program Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian negara/lembaga atau unit kerja pada SKPD	Semakin besar nilai indikator, semakin meningkat ketercapaian Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten	Bagian dari Program Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian negara/lembaga atau unit kerja pada SKPD	Semakin besar nilai indikator, semakin meningkat ketercapaian Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten	Bagian dari Program Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian negara/lembaga atau unit kerja pada SKPD	Semakin besar nilai indikator, semakin meningkat ketercapaian Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten	Bagian dari Program Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian negara/lembaga atau unit kerja pada SKPD	Semakin besar nilai indikator, semakin meningkat ketercapaian Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten	Bagian dari Program Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian negara/lembaga atau unit kerja pada SKPD	Semakin besar nilai indikator, semakin meningkat ketercapaian Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten	Bagian dari Program Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian negara/lembaga atau unit kerja pada SKPD	Semakin besar nilai indikator, semakin meningkat ketercapaian Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten	Bagian dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian negara/lembaga atau unit kerja pada SKPD	Semakin besar nilai indikator, semakin meningkat ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten	Bagian dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian negara/lembaga atau unit kerja pada SKPD	Semakin besar nilai indikator, semakin meningkat ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten	Bagian dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian negara/lembaga atau unit kerja pada SKPD	Semakin besar nilai indikator, semakin meningkat ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten	Bagian dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian negara/lembaga atau unit kerja pada SKPD	Semakin besar nilai indikator, semakin meningkat ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten	Bagian dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian negara/lembaga atau unit kerja pada SKPD	Semakin besar nilai indikator, semakin meningkat ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten	Bagian dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian negara/lembaga atau unit kerja pada SKPD	Semakin besar nilai indikator, semakin meningkat ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten	Bagian dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian negara/lembaga atau unit kerja pada SKPD	Semakin besar nilai indikator, semakin meningkat ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten	Bagian dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian negara/lembaga atau unit kerja pada SKPD	Semakin besar nilai indikator, semakin meningkat ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayannya	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten	Persyaratan adalah Syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. (persyaratan mengacu pada jenis pelayanan)	Semakin besar nilai indikator, semakin tinggi tingkat kepuasan Masyarakat
kemudahan prosedur pelayanan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten	SOP adalah Tata cara pelayanan yang dibekukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. Kemudahan Prosedur Pelayanan adalah kemudahan pelayanan sesuai SOP	Semakin besar nilai indikator, semakin tinggi tingkat kepuasan Masyarakat
kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten	Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Kecepatan waktu adalah jangka waktu yang sudah ditentukan untuk melakukan pelayanan	Semakin besar nilai indikator, semakin tinggi tingkat kepuasan Masyarakat
keadilan dalam pelayanan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten	Keadilan dalam pelayanan adalah Peraturan dan sikap adil dalam pelayanan diterapkan untuk menjamin bahwa setiap pengunjung memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam memanfaatkan koleksi dan sarana yang tersedia	
kesesuaian produk pelayanan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten	kesesuaian Produk Pelayanan adalah Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.	Semakin besar nilai indikator, semakin tinggi tingkat kepuasan Masyarakat
kompetensi/ kemampuan petugas dalam pelayanan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten	Kompetensi adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh petugas pelayanan meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.	Semakin besar nilai indikator, semakin tinggi tingkat kepuasan Masyarakat
perilaku petugas dalam pelayanan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten	Prilaku Petugas Pelayanan adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.	Semakin besar nilai indikator, semakin tinggi tingkat kepuasan Masyarakat
kuualitas sarana dan prasarana	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten	Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha pembangunan, Proyek).	Semakin besar nilai indikator, semakin tinggi tingkat kepuasan Masyarakat
penanganan pengaduan pengguna pelayanan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten	Pengaduan adalah laporan tertulis yang berisi informasi pengaduan. penanganan pengaduan pengguna pelayanan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut	Semakin besar nilai indikator, semakin tinggi tingkat kepuasan Masyarakat
Jenis Kelamin	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten	Jenis Kelamin Responden	Semakin besar nilai indikator, semakin tinggi tingkat kepuasan Masyarakat
Usia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten	Usia Responden Saat Pencacahan	Semakin besar nilai indikator, semakin tinggi tingkat kepuasan Masyarakat
Pendidikan Terakhir yang ditamatkan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten	Pendidikan Terakhir yang ditamatkan	Semakin besar nilai indikator, semakin tinggi tingkat kepuasan Masyarakat
Pekerjaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten	Pekerjaan Utama Responden	Semakin besar nilai indikator, semakin tinggi tingkat kepuasan Masyarakat
Jenis Layanan yang digunakan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten	Jenis Layanan yang digunakan oleh responden	Semakin besar nilai indikator, semakin tinggi tingkat kepuasan Masyarakat
Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten	Jumlah tempat atau bangunan untuk menyimpan padi atau bahan makanan lainnya di Provinsi Banten.	Jumlah pembelian gabah dan/atau beras kemudian dikelola dengan prinsip perputaran stok dalam rangka menjaga kualitas gabah dan/atau beras dan ketersediaan stok
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten	Jumlah Produksi Komoditas Pangan nabati & hewani serta jumlah ketersediaan energi & protein produksi dan ketersediaan termasuk aspek yang mempengaruhinya, kebutuhan pangan dan pemanfaatannya baik untuk dikonsumsi manusia maupun untuk kebutuhan lainnya di Provinsi Banten.	Nilai maximum 100, yang berarti ketersediaan pangan terjaga.
Bed Occupancy Ratio (BOR) RSUD Malingping	UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Malingping	Persentase pemakaian tempat tidur di RSUD Malingping pada satu-satuan waktu tertentu	>85, Pemanfaatan tempat tidur semakin tinggi =60-85, pemanfaatan tempat tidur ideal <60, pemanfaatan tempat tidur yang semakin rendah
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Malingping	UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Malingping	Capaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Medis RSUD Malingping yang terpenuhi	>85, Capaian Standar Pelayanan minimal semakin tinggi =60-85, Capaian Standar Pelayanan minimal ideal <60, Capaian Standar Pelayanan minimal semakin rendah
Jumlah Tempat Tidur di RSUD Malingping	UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Malingping	Salah Satu Sarana Rehabilitasi Alat Kesehatan Yang Berfungsi Sebagai Tempat Istirahat Baik Duduk Maupun Tidur Bagi Pasien	>85, Kondisi tempat tidur baik =60-85, Kondisi tempat tidur ideal <60, Kondisi tempat tidur yang semakin rendah
Jumlah Kamar Rawat Inap di RSUD Malingping	UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Malingping	Ruangan Atau Bangsal (Ward Room) Yang Berisi Tempat Tidur Dan Di Huni Oleh Beberapa Pasien Sekaligus	>85, Kondisi kamar rawat inap baik =60-85, Kondisi kamar rawat inap ideal <60, Kondisi kamar rawat inap yang semakin rendah
Jumlah Tenaga Kesehatan di RSUD Malingping	UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Malingping	Setiap Orang yang Mengabdikan Diri Dalam Bidang Kesehatan Serta Memiliki Pengetahuan Dan/Atau Keterampilan Melalui Pendidikan Di Bidang Kesehatan Yang Untuk Jenis Tertentu Memerlukan Kewenangan Untuk Melakukan Upaya Kesehatan	>85, Pemanfaatan tenaga kesehatan baik =60-85, Pemanfaatan tenaga kesehatan ideal <60, Pemanfaatan tenaga kesehatan yang semakin rendah
Jumlah Kunjungan Pasien di RSUD Malingping	UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Malingping	Setiap Kedatangan Pengunjung (Pasien) Ke Rumah Sakit Untuk Mendapatkan Layanan Yang Tersedia Di Rumah Sakit Tersebut	>85, Jumlah kunjungan pasien tinggi =60-85, Jumlah kunjungan pasien ideal <60, Jumlah kunjungan pasien yang semakin rendah
Indek Kepuasan	UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Malingping	IKM adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik dan untuk mengetahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik di rumah sakit.	Nilai Konversi 25.00 – 64.99, Tidak Baik ( D ) Nilai Konversi 65.00 – 76.60, Kurang Baik ( C ) Nilai Konversi 76.61 - 88.30, Baik ( B ) Nilai Konversi 88.31 - 100.00, Sangat Baik ( A )

Survei Kepuasan Masyarakat	UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Malingping	ukuran yang menentukan seberapa puas konsumen menggunakan produk atau layanan rumah sakit yang telah diberikan, tingkat perasaan pasien yang timbul sebagai akibat dari kinerja pelayanan kesehatan yang diperoleh setelah pasien membandingkannya dengan apa yang diharapkan. Kepuasan konsumen sangat berpengaruh terhadap kinerja pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit.	Nilai Konversi 25.00 – 64.99, Tidak Baik ( D ) Nilai Konversi 65.00 – 76.60, Kurang Baik ( C ) Nilai Konversi 76.61 – 88.30, Baik ( B ) Nilai Konversi 88.31 - 100.00, Sangat Baik ( A )
Bed Occupancy Ratio (BOR) RSUD Banten	UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Banten	Salah satu indikator efisiensi pelayanan untuk melihat berapa banyak tempat tidur di rumah sakit yang digunakan pasien dalam jangka waktu tertentu	>85, Pemanfaatan tempat tidur semakin tinggi =60-85, pemanfaatan tempat tidur ideal <60, pemanfaatan tempat tidur yang semakin rendah
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Banten	UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Banten	Capaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Medis RSUD Banten yang terpenuhi	>85, Capaian Standar Pelayanan minimal semakin tinggi =60-85, Capaian Standar Pelayanan minimal ideal <60, Capaian Standar Pelayanan minimal semakin rendah
Capaian Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Banten	Persyaratan yang terpenuhi dibandingkan dengan seluruh persyaratan RS Pendidikan (13 komponen) regulasi : PP Nomor 93 Tahun 2015	>85, Capaian Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Rumah Sakit diatas target =60-85, Capaian Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Rumah Sakit sesuai target <60, Capaian Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Rumah Sakit dibawah target
Jumlah Kamar Tidur	UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Banten	Salah satu sarana rehabilitasi alat kesehatan yang berfungsi sebagai tempat istirahat baik duduk maupun tidur bagi pasien (UU Nomor 17 Tahun 2023).	>85, kondisi tempat tidur baik =60-85, kondisi tempat tidur ideal <60, kondisi tempat tidur yang semakin rendah
Jumlah SDM Kesehatan	UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Banten	Setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan (UU Nomor 17 Tahun 2023).	>85, Pemanfaatan sdm kesehatan baik =60-85, pemanfaatan SDM kesehatan ideal <60, pemanfaatan SDM kesehatan yang semakin rendah
Jumlah Kunjungan Pasien Tahunan	UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Banten	Setiap kedatangan pengunjung (pasien) ke rumah sakit untuk mendapatkan layanan yang tersedia di rumah sakit tersebut (UU Nomor 17 Tahun 2023).	>85, Jumlah kunjungan pasien semakin tinggi =60-85, Jumlah kunjungan pasien ideal <60, Jumlah kunjungan pasien yang semakin rendah
Jumlah Anggota DPRD Berdasarkan Partai Politik	Sekretariat DPRD Provinsi Banten	Masa Bhakti Anggota DPRD Provinsi Banten Periode 2019-2024	-
Indeks Profesional ASN Dimensi Kompetensi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten	Kemampuan kerja setiap ASN yang mencakup aspek skill, knowledge dan attitude yang dibuktikan dari sertifikat kelulusan mengikuti kegiatan Pengembangan SDM Aparatur (kegiatan pendidikan dan pelatihan)	Semakin besar nilai indikator, semakin banyak jumlah ASN yang berkompeten.
Jumlah Peserta Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II/Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten	Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II/Pimpinan Tinggi Pratama merupakan Pelatihan berjenjang yang diikuti oleh Pejabat Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kab/Kota	Semakin besar nilai indikator, semakin banyak jumlah ASN yang berkompeten.
Jumlah Peserta Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III/Administrator di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten	Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III/Administrator merupakan pelatihan berjenjang yang diikuti Pejabat Eselon III di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota	Semakin besar nilai indikator, semakin banyak jumlah ASN yang berkompeten.
Jumlah Peserta Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV/Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten	Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV/Pengawas merupakan pelatihan berjenjang yang diikuti Pejabat Eselon IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota	Semakin besar nilai indikator, semakin banyak jumlah ASN yang berkompeten.
Jumlah Peserta Pelatihan Dasar CPNS Gol II dan III di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten	Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV/Pengawas merupakan pelatihan berjenjang yang diikuti Pejabat Eselon IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota	Semakin besar nilai indikator, semakin banyak jumlah ASN yang berkompeten.
Jumlah Peserta Pelatihan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten	Pelatihan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum merupakan kelompok Pelatihan bertema Teknis Umum Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota	Semakin besar nilai indikator, semakin banyak jumlah ASN yang berkompeten.
Jumlah Peserta Pelatihan Pengembangan Kompetensi Teknis Substantif di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten	Pelatihan Pengembangan Kompetensi Substantif merupakan kelompok Pelatihan bertema Substantif Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota	Semakin besar nilai indikator, semakin banyak jumlah ASN yang berkompeten.
Jumlah Peserta Pelatihan Pengembangan Kompetensi Manajemen di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten	Pelatihan Pengembangan Kompetensi Manajemen merupakan kelompok Pelatihan bertema Manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota	Semakin besar nilai indikator, semakin banyak jumlah ASN yang berkompeten.
Jumlah Peserta Pelatihan Pengembangan Kompetensi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten	Pelatihan Pengembangan Kompetensi Pemerintah merupakan kelompok Pelatihan bertema Pemerintahan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota	Semakin besar nilai indikator, semakin banyak jumlah ASN yang berkompeten.
Jumlah Peserta Pelatihan Pengembangan Kompetensi Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten	Pelatihan Pengembangan Kompetensi Pemerintah merupakan kelompok Pelatihan bertema Pemerintahan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota	Semakin besar nilai indikator, semakin banyak jumlah ASN yang berkompeten.
Jumlah Alumni Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II [Kode SDS : 25010010]	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten	Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II/Pimpinan Tinggi Pratama merupakan Pelatihan berjenjang yang diikuti oleh Pejabat Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kab/Kota	Semakin besar nilai indikator, semakin banyak jumlah ASN yang berkompeten.
Jumlah Alumni Pelatihan Struktural Kepemimpinan Administrator [Kode SDS : 25010012]	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten	Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III/Administrator merupakan pelatihan berjenjang yang diikuti Pejabat Eselon III di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota	Semakin besar nilai indikator, semakin banyak jumlah ASN yang berkompeten.
Jumlah Alumni Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pengawas [Kode SDS : 25010013]	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten	Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV/Pengawas merupakan pelatihan berjenjang yang diikuti Pejabat Eselon IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota	Semakin besar nilai indikator, semakin banyak jumlah ASN yang berkompeten.
Jumlah Alumni Pelatihan Dasar CPNS (Latsar CPNS) [Kode SDS : 25010007]	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten	Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV/Pengawas merupakan pelatihan berjenjang yang diikuti Pejabat Eselon IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota	Semakin besar nilai indikator, semakin banyak jumlah ASN yang berkompeten.
Jumlah Alumni Pelatihan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten	Pelatihan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum merupakan kelompok Pelatihan bertema Teknis Umum Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota	Semakin besar nilai indikator, semakin banyak jumlah ASN yang berkompeten.
Jumlah Alumni Pelatihan Pengembangan Kompetensi Teknis Substantif di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten	Pelatihan Pengembangan Kompetensi Substantif merupakan kelompok Pelatihan bertema Substantif Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota	Semakin besar nilai indikator, semakin banyak jumlah ASN yang berkompeten.
Jumlah Alumni Pelatihan Pengembangan Kompetensi Manajemen di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten	Pelatihan Pengembangan Kompetensi Manajemen merupakan kelompok Pelatihan bertema Manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota	Semakin besar nilai indikator, semakin banyak jumlah ASN yang berkompeten.
Jumlah Alumni Pelatihan Pengembangan Kompetensi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten	Pelatihan Pengembangan Kompetensi Pemerintah merupakan kelompok Pelatihan bertema Pemerintahan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota	Semakin besar nilai indikator, semakin banyak jumlah ASN yang berkompeten.
Jumlah Alumni Pelatihan Fungsional PNS [Kode SDS : 25010008]	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten	Pelatihan Pengembangan Kompetensi Pemerintah merupakan kelompok Pelatihan bertema Pemerintahan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota	Semakin besar nilai indikator, semakin banyak jumlah ASN yang berkompeten.

Jumlah Peserta Diklat PIM, Diklat Fungsional, Diklat Teknis 20 JP dan seminar/workshop/sejenis yang dibuktikan sertifikat/STTPL	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten	Berisikan data Jumlah Peserta Diklat Fungsional, Diklat Teknis 20 JP dan seminar/workshop/sejenis yang dibuktikan sertifikat/STTPL	Semakin banyak ASN yang memiliki sertifikat maka nilai IP ASN semakin meningkat
Jumlah ASN Provinsi Banten (Struktural, Fungsional, Pelaksana)	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten	Berisikan data Jumlah ASN Pemerintah Provinsi Banten (Struktural, Fungsional, Pelaksana)	Jumlah ASN Provinsi Banten
Cakupan Ketersediaan Bahan Penunjang pengembangan kompetensi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten	Persentase Cakupan Ketersediaan Bahan Penunjang pengembangan kompetensi	Semakin besar nilai indikator, semakin baik nilai indikator program
Persentase Capaian pemantauan dan evaluasi, sertifikasi pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembangan kompetensi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten	Persentase Capaian pemantauan dan evaluasi, sertifikasi pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembangan kompetensi	Semakin besar nilai indikator, semakin baik nilai indikator program
Persentase ASN Provinsi Banten Yang Lulus Uji Kompetensi/ Sertifikasi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten	Persentase ASN Provinsi Banten Yang Lulus Uji Kompetensi/ Sertifikasi	Semakin besar nilai indikator, semakin baik nilai indikator program
Persentase peserta pengembangan kompetensi Dasar, manajemen dan Kepemimpinan,serta Kompetensi Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau STTPL	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten	Persentase peserta pengembangan kompetensi Dasar, manajemen dan Kepemimpinan,serta Kompetensi Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau STTPL	Semakin besar nilai indikator, semakin baik nilai indikator program
Persentase peserta pengembangan kompetensi teknis umum, subntif, dan pemerintahan yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau STTPL	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten	Persentase peserta pengembangan kompetensi teknis umum, subntif, dan pemerintahan yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau STTPL	Semakin besar nilai indikator, semakin baik nilai indikator program
Capaian Sakip OPD	Dinas Kesehatan Provinsi Banten	Akuntabilitas keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Banten	Semakin besar nilai indikator, semakin tinggi jumlah Capaian Sakip OPD yang ada di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.
Angka Kematian Ibu	Dinas Kesehatan Provinsi Banten	Angka Kematian Ibu pada Tahun N / angka kematian ibu pada tahun N-1	Semakin besar nilai indikator, semakin tinggi Angka Kematian Ibu yang ada di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.
Angka Kematian Bayi	Dinas Kesehatan Provinsi Banten	Angka Kematian Bayi pada Tahun N / angka kematian bayi pada tahun N-1	Semakin besar nilai indikator, semakin tinggi Angka Kematian Bayi yang ada di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.
Jumlah Kematian Ibu	Dinas Kesehatan Provinsi Banten	Jumlah Kematian Ibu pada Tahun N / Jumlah kematian ibu pada tahun N-1	Semakin besar nilai indikator, semakin tinggi Jumlah Kematian Ibu yang ada di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.
Jumlah Kematian Bayi	Dinas Kesehatan Provinsi Banten	Jumlah Kematian Bayi pada Tahun N / Jumlah Kematian Bayi pada tahun N-1	Semakin besar nilai indikator, semakin tinggi Jumlah Kematian Bayi yang ada di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.
Jumlah Penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan	Dinas Kesehatan Provinsi Banten	Jumlah Penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan pada Tahun N / Jumlah Penduduk yang belum memiliki jaminan kesehatan tahun N-1	Semakin besar nilai indikator, semakin tinggi Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan yang ada di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.
Jumlah Penduduk Miskin	Dinas Sosial Provinsi Banten	Jumlah Penduduk Miskin adalah jumlah data individu yang terdaftar dalam Database Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Tahun 2022 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (variable Desil = 1 s/d 4).	Semakin tinggi indikator semakin banyak penduduk miskin di Provinsi Banten.
Jumlah Panti Sosial Asuhan Anak di Provinsi Banten	Dinas Sosial Provinsi Banten	Perkembangan Jumlah Panti Sosial Asuhan Anak dari tahun ke tahun di Provinsi Banten.	Jika indikator > 1 maka ada kenaikan jumlah panti sosial asuhan anak; Jika indikator = 1 maka atau berarti jumlah panti sosial asuhan anak belum ada perkembangan / belum ada kenaikan; Jika indikator < 1 maka terdapat pengurangan jumlah panti sosial asuhan anak.
Perkembangan Jumlah Taman Makam Pahlawan	Dinas Sosial Provinsi Banten	Perkembangan jumlah Taman Makam Pahlawan (TMP) per kab./kota se-Provinsi Banten.	Jika indikator > 1 maka ada kenaikan jumlah taman makam pahlawan; Jika indikator = 1 maka atau berarti jumlah taman makam pahlawan belum ada perkembangan / belum ada kenaikan; Jika indikator < 1 maka terdapat pengurangan jumlah taman makam pahlawan.
Jumlah Desa/Kelurahan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten	Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah  Wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan.	Semakin besar nilai indikator, maka semakin banyak desa yang berada di suatu wilayah
Jumlah Desa menurut Status Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten	Status Desa yang terklasifikasi atas: Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju, dan Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM)	Semakin besar nilai indikator, semakin tinggi status desa yang berada di suatu wilayah
Tipologi Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten	Kelompok desa berdasarkan mata pencaharian utama	Semakin besar nilai indikator, semakin banyak yang berprofesi dalam suatu mata pencaharian tertentu di suatu wilayah
Jumlah Kantor Desa/Kelurahan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten	Kondisi Kantor Desa/Kelurahan	Semakin besar nilai indikator, maka semakin banyak Kantor Desa/Kelurahan di suatu wilayah berdasarkan klasifikasi penyajian
Jumlah Aparatur Desa/Kelurahan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten	Jumlah Aparatur Desa/Kelurahan	Semakin besar nilai indikator, maka semakin banyak Aparat Pemerintah Desa/Kelurahan di suatu wilayah berdasarkan klasifikasi penyajian
Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten	Lembaga kemasyarakatan di bawah Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna, Lembaga Adat)	Semakin besar nilai indikator, maka semakin banyak Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang berada di suatu wilayah
Jumlah Desa Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten	Desa Adat yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah	Semakin besar nilai indikator, maka semakin banyak desa yang berada di suatu wilayah
Lembaga Kemasyarakatan Desa Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berada di desa adat	Semakin besar nilai indikator, maka semakin banyak lembaga kemasyarakatan yang berada di suatu wilayah
Jumlah Desa Perbatasan Lintas Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten	Desa yang bersebelahan dengan desa berbeda wilayah Kab/Kota	Semakin besar nilai indikator, maka semakin banyak desa perbatasan lintas kabupaten/kota yang berada di suatu wilayah
Jumlah Kawasan Perdesaan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten	Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.	Semakin besar nilai indikator, maka semakin banyak kawasan perdesaan yang berada di suatu wilayah
Jumlah Rencana Umum Pengadaan (RUP) sesuai SIRUP	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Setda Provinsi Banten	Daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah (Perpres Nomor 12 Tahun 2021).	Semakin meningkat Jumlah Rencana Umum Pengadaan (RUP) sesuai SIRUP, akan membuat optimalnya kinerja Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa
Jumlah Penunjukan Langsung	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Setda Provinsi Banten	Penunjukan langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya dalam keadaan tertentu (Perpres Nomor 12 Tahun 2021).	Semakin meningkat Jumlah Penunjukan Langsung, akan membuat optimalnya kinerja Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa
Jumlah Pengadaan Langsung	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Setda Provinsi Banten	Pengadaan langsung barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan pengadaan langsung jasa konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) (Perpres Nomor 12 Tahun 2021)	Semakin meningkat Jumlah Pengadaan Langsung, akan membuat optimalnya kinerja Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa
Jumlah e-Purchasing (e-Katalog dan Bela Pengadaan/Toko Daring)	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Setda Provinsi Banten	e-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring (Perpres Nomor 12 Tahun 2021)	Semakin meningkat Jumlah e-Purchasing (e-Katalog dan Bela Pengadaan/Toko Daring), akan membuat optimalnya kinerja Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa
Jumlah Tendering/e-Seleksi	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Setda Provinsi Banten	Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya (Perpres Nomor 12 Tahun 2021) / Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia jasa konsultansi (Perpres Nomor 12 Tahun 2021)	Semakin meningkat Jumlah Tendering/e-Seleksi, akan membuat optimalnya kinerja Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa
Jumlah Non e-Tendering dan Non e-Purchasing	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Setda Provinsi Banten	Pencatatan non tender, swakelola dan pencatatan khusus (Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP Nomor 75 Tahun 2022)	Semakin meningkat Jumlah Non e-Tendering dan Non e-Purchasing, akan membuat optimalnya kinerja Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa
Jumlah e-Kontrak	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Setda Provinsi Banten	Fitur pada aplikasi SPSE yang tersedia pada akun Pejabat Pembuat Komitmen (Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP Nomor 75 Tahun 2022)	Semakin meningkat Jumlah e-Kontrak, akan membuat optimalnya kinerja Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa
Jumlah Pengguna Pelayanan di LPSE	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Setda Provinsi Banten	Layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik (Peraturan LKPP RI Nomor 12 Tahun 2021)	Semakin meningkat Pelayanan di LPSE, akan membuat optimalnya kinerja Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa
Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Setda Provinsi Banten	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (Surat Edaran LKPP RI Nomor 4 Tahun 2021)	Semakin meningkat Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa, akan membuat optimalnya kinerja Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa
Persentase Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Setda Provinsi Banten	Penggunaan SPSE (Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE)	Semakin meningkat Pemanfaatan Sistem Pengadaan, akan membuat optimalnya kinerja Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa



Nilai SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan)	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Setda Provinsi Banten	Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP (Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE)	Semakin meningkat Nilai SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) akan membuat optimalnya kinerja Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa
Nilai e-Tendering/e-Seleksi	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Setda Provinsi Banten	Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya (Perpres Nomor 12 Tahun 2021)/ Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia jasa konsultansi (Perpres Nomor 12 Tahun 2021)	Semakin meningkat Nilai e-Tendering/e-Seleksi, akan membuat optimalnya kinerja Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa
Nilai e-Purchasing Katalog	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Setda Provinsi Banten	e-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring (Perpres Nomor 12 Tahun 2021)	Semakin meningkat Nilai e-Purchasing Katalog, akan membuat optimalnya kinerja Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa
Nilai e-Purchasing Toko Daring	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Setda Provinsi Banten	e-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring (Perpres Nomor 12 Tahun 2021)	Semakin meningkat Nilai e-Purchasing, akan membuat optimalnya kinerja Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa
Nilai Non e-Tendering dan Non e-Purchasing, e-Kontrak	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Setda Provinsi Banten	Pencatatan non tender, swakelola dan pencatatan khusus (Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP Nomor 75 Tahun 2022), Fitur pada aplikasi SPSE yang tersedia pada akun Pejabat Pejabat Komitmen (Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP Nomor 75 Tahun 2022)	Semakin meningkat Nilai Non e-Tendering dan Non e-Purchasing, e-Kontrak, akan membuat optimalnya kinerja Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa
Nilai Tingkat Kematangan UKPBJ	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Setda Provinsi Banten	Instrumen pengukuran dalam melaksanakan pengelolaan kelembagaan UKPBJ yang menggambarkan kapabilitas UKPBJ dan menjadi acuan bagi UKPBJ dalam upaya meningkatkan kemampuan UKPBJ menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa (Peraturan LKPP RI Nomor 10 Tahun 2021)	Semakin Nilai Tingkat Kematangan UKPBJ, akan membuat optimalnya kinerja Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa
Level Capaian Kematangan Proaktif	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Setda Provinsi Banten	UKPBJ yang menjalankan fungsi Pengadaan Barang/Jasa dengan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan melalui kolaborasi, penguatan fungsi perencanaan bersama pemangku kepentingan internal maupun eksternal (Peraturan LKPP RI Nomor 10 Tahun 2021)	Semakin meningkat Level Capaian Kematangan Proaktif, akan membuat optimalnya kinerja Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa
Jumlah Variabel untuk Indeks Tata Kelola Pengadaan	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Setda Provinsi Banten	Jumlah Variabel untuk Indeks Tata Kelola Pengadaan (Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE)	Semakin meningkat Jumlah Variabel untuk Indeks Tata Kelola Pengadaan, akan membuat optimalnya kinerja Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa
Nilai Kualifikasi dan Kompetensi SDM Pengadaan Barang/Jasa untuk Indeks Tata Kelola Pengadaan	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Setda Provinsi Banten	Nilai Kualifikasi dan Kompetensi SDM Pengadaan Barang/Jasa untuk Indeks Tata Kelola Pengadaan (Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE)	Semakin meningkat Nilai Kualifikasi dan Kompetensi SDM Pengadaan Barang/Jasa untuk Indeks Tata Kelola Pengadaan, akan membuat optimalnya kinerja Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa
Kebutuhan JF PPBJ yang sudah mendapat rekomendasi kebutuhan dari LKPP dan semua salinan SK Pengangkatan JF PPBJ sudah disampaikan ke LKPP	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Setda Provinsi Banten	Kebutuhan JF PPBJ yang sudah mendapat rekomendasi kebutuhan dari LKPP dan semua salinan SK Pengangkatan JF PPBJ sudah disampaikan ke LKPP (Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE)	Semakin meningkat Kebutuhan JF PPBJ yang sudah mendapat rekomendasi kebutuhan dari LKPP dan semua salinan SK Pengangkatan JF PPBJ sudah disampaikan ke LKPP, akan membuat optimalnya kinerja Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa
Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Setda Provinsi Banten	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa (Recana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2023-2026)	Semakin meningkat Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa, akan membuat optimalnya kinerja Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Setda Provinsi Banten	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (Recana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2023-2026)	Semakin meningkat Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, akan membuat optimalnya kinerja Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa
Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Setda Provinsi Banten	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa (Recana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2023-2026)	Semakin meningkat Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa, akan membuat optimalnya kinerja Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa
Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Setda Provinsi Banten	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (Recana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2023-2026)	Semakin meningkat Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik, akan membuat optimalnya kinerja Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa
Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Setda Provinsi Banten	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (Recana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2023-2026)	Semakin meningkat Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa, akan membuat optimalnya kinerja Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa
Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Setda Provinsi Banten	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (Recana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2023-2026)	Semakin meningkat Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa, akan membuat optimalnya kinerja Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa
Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Setda Provinsi Banten	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa (Recana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2023-2026)	Semakin meningkat Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa, akan membuat optimalnya kinerja Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa
Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Setda Provinsi Banten	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa (Recana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2023-2026)	Semakin meningkat Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa, akan membuat optimalnya kinerja Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Setda Provinsi Banten	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa (Recana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2023-2026)	Semakin meningkat Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa, akan membuat optimalnya kinerja Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa
Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Setda Provinsi Banten	Capaian SAKIP Perangkat Daerah (Recana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2023-2026)	Semakin meningkat Capaian SAKIP Perangkat Daerah akan membuat optimalnya kinerja Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa
Jumlah Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Setda Provinsi Banten	Jumlah Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Recana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2023-2026)	Semakin meningkat Jumlah Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, akan membuat optimalnya kinerja Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa
Jumlah Kegiatan yang diampu	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Setda Provinsi Banten	Jumlah Kegiatan yang diampu (Recana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2023-2026)	Semakin meningkat Jumlah Kegiatan yang diampu, akan membuat optimalnya kinerja Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Setda Provinsi Banten	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Recana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2023-2026)	Semakin meningkat Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, akan membuat optimalnya kinerja Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Setda Provinsi Banten	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Recana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2023-2026)	Semakin meningkat Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, akan membuat optimalnya kinerja Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Setda Provinsi Banten	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Recana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2023-2026)	Semakin meningkat Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, akan membuat optimalnya kinerja Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Setda Provinsi Banten	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Recana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2023-2026)	Semakin meningkat Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD, akan membuat optimalnya kinerja Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Setda Provinsi Banten	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Recana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2023-2026)	Semakin meningkat Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD, akan membuat optimalnya kinerja Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Setda Provinsi Banten	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Recana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2023-2026)	Semakin meningkat Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, akan membuat optimalnya kinerja Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Setda Provinsi Banten	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Recana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2023-2026)	Semakin meningkat Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, akan membuat optimalnya kinerja Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Setda Provinsi Banten	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Recana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2023-2026)	Semakin meningkat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, akan membuat optimalnya kinerja Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Setda Provinsi Banten	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Recana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2023-2026)	Semakin meningkat Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, akan membuat optimalnya kinerja Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa
Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Setda Provinsi Banten	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Recana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2023-2026)	Semakin meningkat Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan, akan membuat optimalnya kinerja Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Setda Provinsi Banten	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Recana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2023-2026)	Semakin meningkat Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD, akan membuat optimalnya kinerja Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa
Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Setda Provinsi Banten	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Recana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2023-2026)	Semakin meningkat Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, akan membuat optimalnya kinerja Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Setda Provinsi Banten	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Recana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2023-2026)	Semakin meningkat Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, akan membuat optimalnya kinerja Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa
Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Setda Provinsi Banten	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Recana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2023-2026)	Semakin meningkat Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, akan membuat optimalnya kinerja Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Setda Provinsi Banten	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Recana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2023-2026)	Semakin meningkat Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan, akan membuat optimalnya kinerja Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Setda Provinsi Banten	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Recana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2023-2026)	Semakin meningkat Jumlah Penunjukan Langsung, akan membuat optimalnya kinerja Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Setda Provinsi Banten	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Recana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2023-2026)	Semakin meningkat Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan, akan membuat optimalnya kinerja Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Setda Provinsi Banten	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Recana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2023-2026)	Semakin meningkat Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan, akan membuat optimalnya kinerja Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Setda Provinsi Banten	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Recana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2023-2026)	Semakin meningkat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, akan membuat optimalnya kinerja Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Setda Provinsi Banten	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Recana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2023-2026)	Semakin meningkat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan, akan membuat optimalnya kinerja Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Setda Provinsi Banten	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Recana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2023-2026)	Semakin meningkat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan, akan membuat optimalnya kinerja Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa
Jumlah Penduduk	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten	Penduduk adalah penduduk yang terdaftar di kantor kependudukan dan catatan sipil seluruh wilayah Provinsi Banten	Semakin besar nilai indikator, maka semakin banyak penduduk Provinsi Banten
Sex Ratio Penduduk	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten	Sex Ratio (Rasio Jenis Kelamin) adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan, biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan	SR > 100 berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan, b. SR = 100 berarti jumlah penduduk laki-laki sama dengan jumlah penduduk perempuan, c. SR < 100 berarti jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki.
Kepadatan Penduduk	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten	Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk per satuan luas daerah	Semakin besar nilai indikator, maka semakin padat penduduk pada suatu daerah
Jumlah Rumah Tangga (RT)	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten	Rumah Tangga (RT) per Kabupaten/Kota	Semakin besar nilai indikator, maka semakin Rumah tangga
Jumlah Penduduk Wajib KTP	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten	Penduduk wajib KTP adalah warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Tetap dan telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah nikah secara sah	Semakin besar nilai indikator, maka semakin banyak penduduk yang wajib KTP
Jumlah Penduduk Memiliki E-KTP	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten	Penduduk yang telah melakukan perekaman dan memiliki E-KTP	Semakin besar nilai indikator, maka semakin banyak penduduk yang telah memiliki E-KTP
Jumlah Penduduk Belum Memiliki E-KTP	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten	Penduduk yang sudah melakukan perekaman tapi belum memiliki E-KTP	Semakin besar nilai indikator, maka semakin banyak penduduk yang belum memiliki E-KTP
Jumlah Penduduk Telah Memiliki Akta Kelahiran	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten	Penduduk yang telah memiliki akte kelahiran	Semakin besar nilai indikator, maka semakin banyak penduduk yang telah memiliki akte kelahiran
Jumlah Penduduk Belum Memiliki Akta Kelahiran	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten	Penduduk Belum Memiliki Akta Kelahiran	Semakin besar nilai indikator, maka semakin banyak penduduk yang belum memiliki akte kelahiran
Jumlah Penduduk Memiliki Kartu Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten	Penduduk sudah Memiliki Kartu Keluarga	Semakin besar nilai indikator, maka semakin banyak penduduk yang telah memiliki Kartu Keluarga
Jumlah Penduduk Belum Memiliki Kartu Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten	Penduduk Belum Memiliki Kartu Keluarga	Semakin besar nilai indikator, maka semakin banyak penduduk yang belum memiliki Kartu Keluarga
Jumlah Penduduk Memiliki Akta Nikah	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten	Penduduk Sudah Memiliki Akta Nikah	Semakin besar nilai indikator, maka semakin banyak penduduk yang telah memiliki Akta Nikah
Jumlah Penduduk Belum Memiliki Akta Nikah	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten	Penduduk Belum Memiliki Akta Nikah	Semakin besar nilai indikator, maka semakin banyak penduduk yang belum memiliki Akta Nikah
Jumlah Penduduk Memiliki Akta Perceraian	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten	Penduduk Memiliki Akta Perceraian	Semakin besar nilai indikator, maka semakin banyak penduduk yang telah memiliki Akta Perceraian
Jumlah Penduduk Belum Memiliki Akta Perceraian	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten	Penduduk Belum Memiliki Akta Perceraian	Semakin besar nilai indikator, maka semakin banyak penduduk yang belum memiliki Akta Perceraian
Jumlah Pasangan Usia Subur	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten	Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun atau pasangan suami istri yang istri berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau istri berumur lebih dari 50 tahun, tetapi masih haid (datang bulan)	Semakin besar nilai indikator, maka semakin banyak Pasangan Usia Subur
Peserta KB	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten	Peserta KB adalah anggota masyarakat yang mengikuti gerakan KB dengan melaksanakan penggunaan alat kontrasepsi.	Semakin besar nilai indikator, maka semakin banyak peserta KB yang menggunakan alat kontrasepsi berdasarkan jenisnya
Jumlah Alat Peraga KB	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten	alat peraga merupakan media pembelajaran yang mengandung atau membawakan ciri-ciri konsep yang dipelajari terkait KB	Semakin besar nilai indikator, maka semakin banyak Jumlah alat peraga KB
Puskesmas	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten	Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang amat penting di Indonesia. Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kabupaten/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja	Semakin besar nilai indikator, maka semakin banyak Jumlah Puskesmas

Puskesmas Pembantu	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten	Puskesmas Pembantu (Pustu) merupakan jaringan pelayanan Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas. Puskesmas Pembantu merupakan bagian integral Puskesmas, yang harus dibangun secara berkala oleh Puskesmas	Semakin besar nilai indikator, maka semakin banyak Jumlah Puskesmas Pembantu
Klinik KB	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten	Klinik yang menyediakan layanan KB	Semakin besar nilai indikator, maka semakin banyak Jumlah Klinik KB
Pos Pelayanan Keluarga Berencana Desa	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten	Pos Pelayanan keluarga berencana desa adalah saranapembinaan dan pelayanan keluarga berencana melalui sistem kelompok-kelompok akseptor keluarga berencana, yang mula-mula timbul atas inisiatif dan kesadaran masyarakat sendiri di desa untuk mencapai kelestarian akseptor keluarga berencana, menuju ke arah keluarga kecil yang sejahtera	Semakin besar nilai indikator, maka semakin banyak Jumlah pos Pelayanan Keluarga Berencana Desa
Dokter	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten	Dokter adalah orang yang memiliki kewenangan dan izin sebagaimana mestinya untuk melakukan pelayanan kesehatan, khususnya memeriksa dan mengobati penyakit dan melakukan prosedur hukum dalam pelayanan kesehatan	Semakin besar nilai indikator, maka semakin banyak Jumlah Dokter
Bidan	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten	Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan Bidan yang diakui pemerintah dan organisasi profesi di wilayah Negara Republik Indonesia serta memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk diregister, sertifikasi dan atau secara sah mendapat lisensi untuk menjalankan praktik kebidanan	Semakin besar nilai indikator, maka semakin banyak Jumlah Bidan
Petugas Lapangan KB	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten	Petugas Lapangan KB atau PLKB adalah Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) dan juga ada yang Non PNS yang direkrut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Petugas ini berkedudukan di Desa/Kelurahan yang bertugas melaksanakan, mengelola, menggerakkan, memberdayakan serta menggalang dan mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan program Kependudukan dan KB bersama lembaga masyarakat ( Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) di Desa/Kelurahan ,Sub PPKBD di Dusun/RW dan Kader KB di RT	Semakin besar nilai indikator, maka semakin banyak Jumlah Petugas lapangan KB
Penyuluh KB	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten	Penyuluh Keluarga Berencana adalah "Pegawai Negeri Sipil" yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan melakukan kegiatan penyuluhan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Semakin besar nilai indikator, maka semakin banyak Jumlah Penyuluh KB
Jumlah Kelompok Bina Keluarga Balita	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten	Bina keluarga balita adalah kegiatan yang khusus mengelola tentang pembinaan tumbuh kembang anak melalui pola asuh yang benar berdasarkan kelompok umur, yang dilaksanakan oleh sejumlah kader dan berada ditingkat Desa	Semakin besar nilai indikator, maka semakin banyak Jumlah Kelompok Bina Keluarga Balita
Jumlah Kelompok Bina Keluarga Remaja	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten	BKR (Bina Keluarga Remaja) adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok keluarga/orang tua untuk meningkatkan bimbingan/pembinaan tumbuh kembang remaja secara baik dan terarah dalam rangka membangun keluarga yang berkualitas	Semakin besar nilai indikator, maka semakin banyak Jumlah Kelompok Bina Keluarga Remaja
Jumlah Kelompok Bina Keluarga Lansia	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten	BKL adalah kelompok kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang memiliki lanjut usia dalam pengasuhan, perawatan dan pemberdayaan lansia agar dapat meningkatkan kesejahteraan	Semakin besar nilai indikator, maka semakin banyak Jumlah Kelompok Bina Keluarga Lansia
Jumlah Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten	Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) merupakan jejaring kerja pemerintah di tingkat desa/kelurahan, yang berfungsi sebagai fasilitator KB desa/kelurahan dan membantu kepala desa/lurah dalam melaksanakan program KB	Semakin besar nilai indikator, maka semakin banyak Jumlah Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa
Jumlah Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten	Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) adalah untuk membantu tugas PLKB sebagai upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan sosialisasi program KB kepada masyarakat.	Semakin besar nilai indikator, maka semakin banyak Jumlah Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa
Jumlah Pekerja Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten	Jumlah pekerja perempuan baik pada lembaga pemerintah maupun non pemerintah	Semakin besar nilai indikator, maka semakin banyak pekerja perempuan
Jumlah Perempuan Sebagai Kepala Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten	Berisikan data Jumlah Perempuan Sebagai Kepala Keluarga	Semakin besar nilai indikator, maka semakin banyak perempuan sebagai kepala keluarga
Jumlah Perempuan Sebagai Pelaku Kekerasan	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten	Berisikan data Jumlah Perempuan Sebagai Pelaku Kekerasan	Semakin besar nilai indikator, maka semakin banyak perempuan sebagai Pelaku kekerasan
Jumlah Perempuan Sebagai Korban Kekerasan	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten	Berisikan data Jumlah Perempuan Sebagai Korban Kekerasan	Semakin besar nilai indikator, maka semakin banyak perempuan sebagai korban kekerasan
Jumlah Pengaduan Perempuan Korban Kekerasan Ditindak Lanjuti	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten	Berisikan data Jumlah Pengaduan Perempuan Korban Kekerasan Ditindak Lanjuti	Semakin besar nilai indikator, maka semakin banyak Pengaduan korban kekerasan yang ditindaklanjuti
Jumlah Pengaduan Anak Korban Kekerasan Ditindak Lanjuti	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten	Berisikan data Jumlah Pengaduan Anak Korban Kekerasan Ditindak Lanjuti	Semakin besar nilai indikator, maka semakin banyak Pengaduan anak korban kekerasan yang ditindaklanjuti
Jumlah Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten	Jumlah perempuan di seluruh wilayah Provinsi Banten	Semakin besar nilai indikator, maka semakin banyak perempuan sesuai dengan klasifikasi penyajian
Jumlah Anak Laki-Laki	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten	Jumlah anak laki-laki yang belum berusia 18 tahun di seluruh wilayah Provinsi Banten	Semakin besar nilai indikator, maka semakin banyak Anak Laki-Laki Tidak Bersekolah
Jumlah Anak Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten	Jumlah anak perempuan yang belum berusia 18 tahun di seluruh wilayah Provinsi Banten	Semakin besar nilai indikator, maka semakin banyak Anak Perempuan Tidak Bersekolah